

# WHITEPAPER

## **Disonansi Kebijakan dan Kegagalan Translasi Visi**

*Ketidakselarasan Visi Presiden dan Kapasitas Kementerian  
Teknis sebagai Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*

Oleh: Eisenhower Rockefeller  
CEO Eisen Group  
Mei 2026



---

## KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang kaya akan kontradiksi. Di satu sisi, sumber daya alam berlimpah, populasi produktif terbesar keempat di dunia, dan posisi geografis yang berada di persimpangan jalur perdagangan terpenting di planet ini. Di sisi lain, ekspor Indonesia kalah dari Vietnam yang berpenduduk sepertiga kita. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% selama satu dekade. Hilirisasi yang sudah benar arahnya berjalan tertatih-tatih. Dan investasi yang seharusnya deras masuk kerap terhenti di labirin birokrasi yang tidak efisien.

Pertanyaan yang mendorong saya menulis whitepaper ini bukan 'apakah visi presiden salah?' — karena secara substansial, arahnya benar. Pertanyaannya adalah: mengapa visi yang benar tidak menghasilkan eksekusi yang benar? Sebagai pelaku bisnis ekspor yang berhadapan langsung dengan regulasi kementerian teknis setiap harinya — dari perizinan KKP, koordinasi Kemendag, hingga navigasi kebijakan Kemenperin — saya menyaksikan sendiri di mana rantai transmisi itu putus. Bukan di level visi, tapi di level translasi.

Whitepaper ini adalah upaya saya untuk menamai masalah itu secara jelas, mendokumentasikannya secara akademis, dan menawarkan rekomendasi yang konkret — bukan sekadar kritik tanpa solusi.



**EISENHOWER ROCKEFELLER**

CEO Eisen Group



## PROFIL PENULIS

Eisenhower Rockefeller adalah pengusaha ekspor B2B Indonesia yang aktif membangun dan mengoperasikan beberapa bisnis berbasis komoditas dan energi secara langsung. Ia adalah CEO Eisen Group, grup usaha yang mencakup Pinator Energy — perusahaan ekspor wood pellet ke pasar Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok untuk kebutuhan pembangkit listrik — serta Savya Charcoal, yang bergerak di bidang ekspor arang dan sedang mengembangkan lini activated carbon. Di luar sektor energi biomassa, Eisenhower juga aktif dalam ekspor seafood ke pasar Timur Tengah, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan.

Perspektif yang dituangkan dalam whitepaper ini lahir dari pengalaman operasional nyata di lapangan: negosiasi kontrak buyer B2B lintas negara, manajemen supply chain komoditas ekspor, proses kurasi mitra produksi, dan navigasi regulasi perdagangan internasional. Sebagai praktisi yang benar-benar menjalankan bisnis — bukan sekadar membicarakannya — ia melihat secara langsung distorsi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan yang lahir tanpa pemahaman mendalam terhadap realita operasional di lapangan.

---

# EXECUTIVE SUMMARY

---

Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang serius: visi presiden yang ambisius dan secara substansial benar, namun gagal dieksekusi akibat ketidakmampuan kementerian teknis menerjemahkan arahan strategis menjadi kebijakan operasional yang konkret. Whitepaper ini mengidentifikasi tiga akar struktural dari stagnasi ekonomi Indonesia:

- Kabinet yang dibangun atas dasar utang politik (patronage cabinet), bukan kompetensi — menghasilkan menteri-menteri tanpa domain knowledge yang memadai di bidang yang dipimpinnya.
- Jumlah kementerian yang terlalu gemuk (48 kementerian) dengan proliferasi wakil menteri sebagai instrumen bagi-bagi kursi politik — menciptakan coordination overhead yang mengalahkan manfaat spesialisasi.
- Spektrum partai politik tanpa diferensiasi ideologis yang jelas: 18 partai peserta Pemilu 2024, hanya 8 lolos parlemen, hampir seluruhnya masuk koalisi — sistem tanpa oposisi substantif dan tanpa visi ekonomi yang koheren.

## Temuan Utama / Key Findings

Vietnam — dengan populasi sepertiga Indonesia dan jumlah kementerian yang jauh lebih sedikit — mencatat ekspor USD 355 miliar dibanding Indonesia USD 258 miliar pada 2023. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (MoIT) berfungsi sebagai engine pertumbuhan yang aktif bernegosiasi langsung dengan Samsung, Intel, dan LG. Di Indonesia, tidak ada kementerian teknis yang memiliki otoritas dan kapasitas setara. Sementara itu, Kementerian Keuangan yang seharusnya berperan sebagai penjaga fiskal justru merangkap ke ranah moneter yang menjadi domain Bank Indonesia — menjadikannya seperti kasir negara, tanpa ada mesin ekonomi yang sesungguhnya bergerak.

## REKOMENDASI UTAMA / KEY RECOMMENDATIONS:

- 1** Jangka pendek: moratorium wakil menteri baru, KPI publik kementerian teknis, Inter-Ministerial Economic Task Force.
  - 2** Jangka menengah: merger kementerian tumpang tindih, reformasi rekrutmen eselon I-II berbasis meritokrasi.
  - 3** Jangka panjang: reformasi UU Kementerian Negara (maks. 28 kementerian), reformasi sistem kepartaian menuju spektrum ideologis yang lebih jelas.
-

# PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, populasi produktif terbesar keempat di dunia, dan posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan global. Namun pertumbuhan ekonominya stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir — jauh di bawah potensi aktualnya dan tertinggal dari negara-negara tetangga yang kondisinya secara historis lebih terbatas.

Pemerintahan saat ini memiliki visi yang secara arah sudah benar: hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, penguatan ekonomi maritim dan perikanan, serta industrialisasi berbasis domestik. Visi ini, apabila dieksekusi dengan benar, memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun visi tersebut tidak bergerak dari ruang rapat istana ke lapangan. Rantai transmisi antara visi presiden dan eksekusi kementerian teknis terputus secara sistemik — dan itulah inti permasalahan yang dianalisis dalam whitepaper ini.

## Kerangka Analitis

Whitepaper ini menggunakan pendekatan multi-teoritis yang saling melengkapi. Principal-Agent Theory digunakan untuk mendiagnosis mengapa visi presiden gagal ditranslasi oleh kementerian. Developmental State Theory digunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya negara berperan sebagai engine ekonomi aktif. Catch-All Party Theory digunakan untuk menganalisis kegagalan sistem kepartaian. Dan studi komparatif model kepemimpinan Lee Kuan Yew serta Deng Xiaoping digunakan sebagai referensi historis tentang eksekusi yang berhasil.

Layer Analisis	Teori / Framework	Fungsi dalam Whitepaper
Diagnostik	Principal-Agent Theory (Jensen & Meckling, 1976)	Mengapa visi presiden gagal ditranslasi ke kementerian
Komparatif	LKY + Deng Xiaoping Leadership Models	Fokus sekuensial sebagai model eksekusi yang berhasil
Preskriptif	Developmental State Theory (Johnson, 1982)	Bagaimana negara seharusnya berperan sebagai engine aktif
Kepartaian	Catch-All Party Theory (Kirchheimer, 1966)	Akar masalah spektrum partai yang kabur dan tidak akuntabel

---

# 1

## PARADOKS VISI DAN STAGNASI

**Selama lebih dari satu dekade, Indonesia konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Angka ini terlihat stabil, namun menyimpan masalah yang lebih dalam: Indonesia tumbuh di bawah potensinya. Dengan sumber daya alam, demografi, dan posisi geografis yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu tumbuh di kisaran 7–8% secara konsisten — seperti yang sedang dicapai Vietnam dan India hari ini.**

Paradoksnya: visi pembangunan presiden saat ini secara substansial sudah benar. Hilirisasi nikel terbukti menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Swasembada pangan adalah target yang rasional mengingat Indonesia adalah salah satu produsen pertanian terbesar di dunia. Penguatan ekonomi biru dan perikanan adalah logis mengingat Indonesia memiliki ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) terbesar kedua di dunia. Semua arah ini benar — masalahnya ada pada eksekusi, bukan visi.

Pertanyaannya kemudian bukan tentang visinya, melainkan tentang mengapa visi yang benar tidak menghasilkan kebijakan yang benar, dan mengapa kebijakan yang benar tidak menghasilkan program yang benar, dan mengapa program yang benar tidak menghasilkan hasil yang benar. Ini adalah pertanyaan tentang kapasitas translasi — dan kapasitas translasi adalah fungsi dari kompetensi kementerian teknis.

### 1.1 Kegagalan Translasi: Principal-Agent Theory

Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antara presiden dan menteri adalah hubungan principal-agent yang klasik. Presiden sebagai principal mendelegasikan otoritas kepada menteri sebagai agent untuk menjalankan kebijakan. Teori ini mengidentifikasi tiga masalah mendasar yang mencegah agent menjalankan kehendak principal secara optimal: pertama, information asymmetry — agent memiliki informasi yang berbeda dan seringkali lebih terbatas dari yang dibutuhkan untuk eksekusi yang efektif; kedua, perbedaan insentif — agent tidak selalu memiliki insentif yang selaras dengan tujuan principal; dan ketiga, incompetence — agent mungkin tidak memiliki kapasitas teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan mandat yang diberikan.

Di Indonesia, ketiga masalah ini hadir sekaligus dan saling memperkuat. Menteri yang diangkat bukan karena keahlian sektoral menghadapi information gap yang masif terhadap bidang yang dipimpinnya. Insentif mereka lebih ke arah mempertahankan posisi dan membalas jasa koalisi partai daripada mencapai target ekonomi nasional. Dan secara kompetensi, banyak yang memang tidak memiliki kapasitas teknis untuk memimpin kementerian strategis.

## Tiga Kegagalan Agent di Indonesia

1. Information Asymmetry: Menteri yang diangkat bukan karena keahlian sektoral menghadapi kesenjangan pengetahuan yang masif — ia tidak tahu apa yang tidak ia ketahui, dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa.
2. Perbedaan Insentif: Insentif menteri lebih ke arah mempertahankan posisi dan membalas jasa partai daripada mencapai target ekonomi nasional. Survivalitas politik mendominasi kalkulasi kebijakan.
3. Incompetence: Banyak menteri tidak memiliki kapasitas teknis untuk memimpin kementerian strategis — dipilih berdasarkan jasa politik dan loyalitas elektoral, bukan rekam jejak profesional di bidang yang relevan.

## 1.2 Rantai Transmisi yang Putus

Visi presiden harus melewati serangkaian transformasi sebelum menjadi kenyataan di lapangan. Setiap tahap transformasi membutuhkan kompetensi yang berbeda — dan dengan menteri tanpa domain knowledge, rantai ini putus di tahap pertama dan efek dominonya terasa sampai ke hasil akhir di lapangan.

Yang membuat masalah ini semakin kompleks adalah bahwa kegagalan di setiap tahap tidak selalu terlihat secara eksplisit. Regulasi diterbitkan — terlihat ada kemajuan. Program diluncurkan — terlihat ada aktivitas. Target ditetapkan — terlihat ada akuntabilitas. Tapi di balik semua aktivitas formal tersebut, substansinya tidak ada: regulasinya tidak operasional, programnya tidak berbasis konteks industri nyata, dan targetnya tidak terukur atau terlalu mudah dicapai sehingga tidak mendorong perubahan nyata.

Tahap Transmisi	Yang Dibutuhkan	Yang Terjadi di Indonesia
Arahan Presiden → Regulasi	Domain knowledge mendalam + legal drafting yang presisi	Regulasi generik, multitafsir, dan tidak operasional
Regulasi → Program	Perencanaan teknis sektoral berbasis data industri	Program copy-paste tanpa memahami konteks lapangan
Program → Target	KPI berbasis data industri riil yang dapat diverifikasi	Target tidak terukur, terlalu mudah, atau tidak relevan
Target → Eksekusi	Birokrasi terlatih, anggaran cukup, koordinasi lintas lembaga	Birokrasi silo, anggaran terserap overhead struktural
Eksekusi → Hasil	Monitoring independen dan evaluasi berbasis outcome	Laporan internal yang tidak diaudit, tidak ada akuntabilitas publik

---

## 2

# ANATOMI KABINET: UTANG POLITIK DAN INKOMPETENSI STRUKTURAL

Setiap siklus pemilu di Indonesia menghasilkan fenomena yang sama: presiden terpilih yang terikat oleh koalisi partai yang membantunya menang, kemudian harus 'membayar' dukungan tersebut dengan kursi di kabinet. Ini bukan kelemahan personal presiden manapun — ini adalah konsekuensi struktural dari sistem multipartai dengan presidential threshold yang tinggi, di mana tidak ada partai yang cukup besar untuk memenangkan pemilu sendirian.

Akibatnya, setiap kabinet lahir bukan dari seleksi terbaik berdasarkan kompetensi, melainkan dari negosiasi koalisi yang kompleks di mana setiap partai pendukung menuntut 'jatah' kementerian sebagai imbalan dukungan elektoral. Praktik ini dalam ilmu politik disebut spoils system atau patronage cabinet — dan Indonesia adalah salah satu demokrasi yang paling konsisten menerapkannya di level kabinet.

### Spoils System dan Patronage Cabinet

Spoils system adalah mekanisme di mana jabatan pemerintah didistribusikan kepada pendukung politik sebagai imbalan dukungan elektoral, bukan berdasarkan merit dan kompetensi. Istilah ini lahir dari ungkapan Andrew Jackson pada 1832: 'to the victor belong the spoils' — kepada pemenang, rampasanlah miliknya. Di Indonesia, sistem ini berjalan sangat sistematis: partai koalisi mendapat jatah menteri sesuai porsi dukungan, dan menteri tersebut kemudian mengisi posisi-posisi di bawahnya dengan kader dan loyalis partai yang

### 2.1 Kabinet Gemuk: Angka yang Tidak Sebanding

Kabinet Indonesia saat ini terdiri dari 48 kementerian — hampir tiga kali lipat Singapura yang hanya memiliki 16, dan jauh di atas Vietnam yang hanya 18. Setiap kementerian membawa struktur birokrasi penuh: sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat, staf khusus, dan staf ahli. Biaya operasional kabinet besar ini menyerap anggaran yang seharusnya digunakan untuk program produktif.

Yang lebih penting dari angka absolutnya adalah rasio antara jumlah kementerian dan output ekonomi yang dihasilkan. Vietnam dengan 18 kementerian dan populasi sepertiga Indonesia justru mencatatkan ekspor USD 355 miliar — melampaui Indonesia yang USD 258 miliar pada 2023. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa efektivitas kementerian teknis — bukan jumlahnya — yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

---

Negara	Jml. Kementerian	PDB/Kapita (USD)	Ekspor 2023 (USD)	Catatan
Singapura	16	88.000	583 Miliar	Technocrat-led, meritokrasi murni
Vietnam	18	4.300	355 Miliar	MoIT sebagai engine pertumbuhan aktif
Malaysia	26	12.000	285 Miliar	Lebih ramping pasca reformasi 2018
Thailand	20	7.000	287 Miliar	Kementerian teknis terkoordinasi baik
Indonesia	48	4.900	258 Miliar	Populasi 3x Vietnam, ekspor lebih kecil

## 2.2 Fenomena Wakil Menteri Berlapis

Di luar jumlah kementerian yang gemuk, Indonesia menghadapi masalah lain yang tidak kalah serius: proliferasi wakil menteri. Beberapa kementerian bahkan memiliki lebih dari satu wakil menteri. Secara formal, posisi ini dimaksudkan untuk membantu beban kerja menteri. Secara substantif, ia berfungsi sebagai instrumen akomodasi politik — 'kursi parkir' bagi tokoh-tokoh yang perlu ditempatkan namun tidak tersedia cukup kursi menteri.

Dampaknya berlapis dan sangat konkret. Pertama, setiap wakil menteri membawa struktur pendukung penuh: staf khusus, staf ahli, anggaran operasional, kendaraan dinas, dan protokol — seluruhnya dibiayai APBN. Ini adalah pemborosan sumber daya negara yang sistematis. Kedua, ketika menteri dan wakil menteri berasal dari partai atau faksi yang berbeda, terjadi dualisme komando yang memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan kebingungan di tingkat birokrasi bawah. Bawahan tidak tahu harus loyal ke siapa, sehingga terjadi kelumpuhan eksekutif di tengah tumpukan jabatan yang kelihatannya aktif. Ketiga, dan ini yang paling tersembunyi namun paling mahal: waktu dan energi birokrat senior terserap untuk koordinasi internal yang tidak produktif, bukan untuk pengambilan kebijakan yang substantif.

Deng Xiaoping memahami masalah ini secara intuitif. Ia secara aktif menghapus posisi-posisi seremonial di Politburo yang tidak memiliki fungsi riil, karena ia tahu bahwa posisi tanpa fungsi bukan sekadar pemborosan anggaran — posisi tanpa fungsi merusak morale organisasi, mengaburkan akuntabilitas, dan menciptakan ilusi kapasitas yang tidak nyata. Wakil menteri tanpa workload riil di Indonesia adalah ekuivalen modern dari apa yang Deng perjuangkan untuk dihapus.

# 3

## DISTORSI PERAN: KEMENKEU SEBAGAI KASIR, BUKAN ARSITEK

Dalam arsitektur ekonomi yang sehat, terdapat pembagian peran yang jelas dan tidak tumpang tindih antara dua institusi kunci: Kementerian Keuangan sebagai penjaga fiskal, dan Bank Indonesia sebagai pengendali kebijakan moneter. Kemenkeu bertugas memastikan APBN seimbang, utang terkelola, dan anggaran teralokasi secara efisien ke kementerian teknis yang menjadi engine pertumbuhan. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan nasional. Keduanya bekerja secara sinergis namun dalam domain yang terpisah — sesuai dengan mandat konstitusional masing-masing.

Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah dua distorsi yang berjalan bersamaan dan saling melemahkan. Di satu sisi, Kementerian Keuangan mulai masuk ke ranah kebijakan moneter yang secara konstitusional adalah domain Bank Indonesia — menciptakan tumpang tindih otoritas yang mengaburkan garis pertanggungjawaban. Di sisi lain, kementerian teknis yang seharusnya menjadi engine pertumbuhan — Kemenperin, Kemendag, Kementan, KKP — terlalu lemah, terlalu terfragmentasi, dan terlalu kurang sumber daya untuk menjalankan peran tersebut secara efektif.

Akibatnya, tidak ada satu pun institusi yang berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi riil. Kemenkeu yang terlalu dominan berfungsi seperti kasir negara — menghitung pemasukan dan pengeluaran, menjaga angka fiskal tetap rapi di atas kertas — namun tidak ada yang menjadi arsitek pertumbuhan yang sesungguhnya.



### 3.1 Pembagian Peran yang Seharusnya

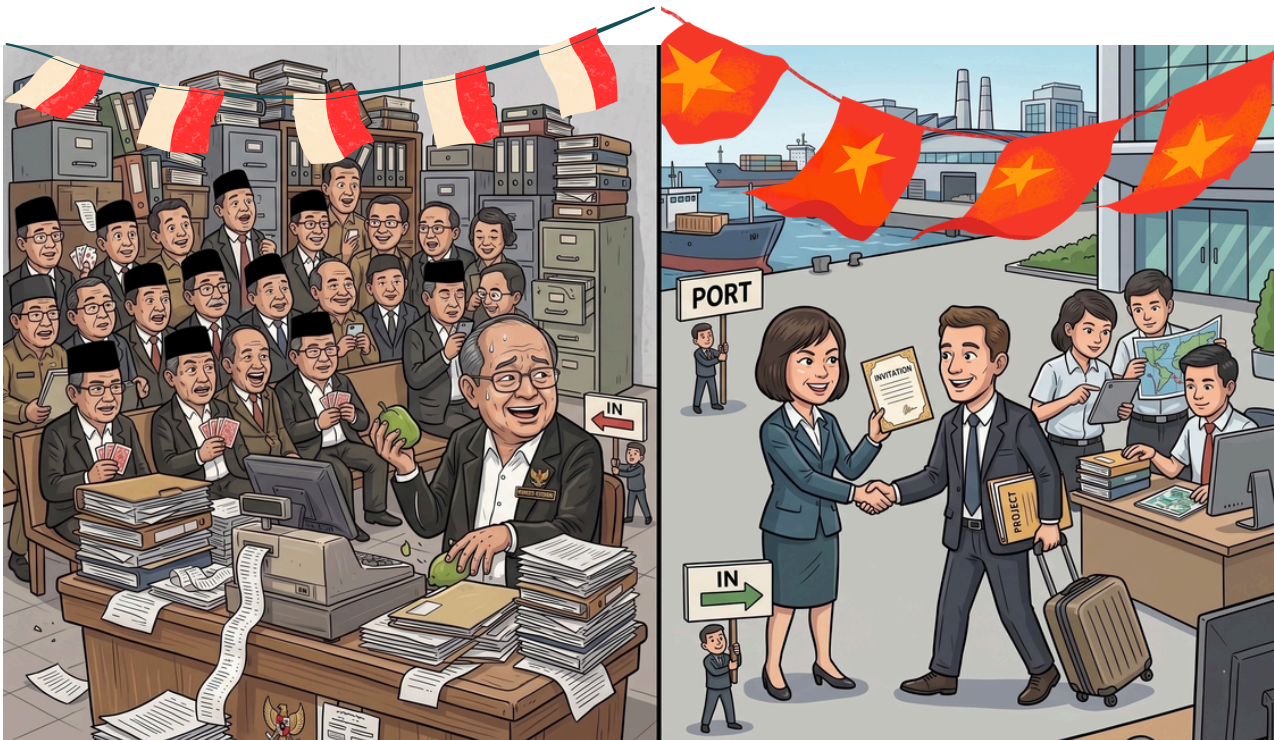
Institusi	Peran Ideal	Kondisi Aktual
<b>Bank Indonesia</b>	Kebijakan moneter: suku bunga, inflasi, nilai tukar, stabilitas sistem keuangan	Berfungsi relatif baik secara mandiri sebagai otoritas moneter
<b>Kemenkeu</b>	Fiskal: APBN, pajak, utang, alokasi anggaran ke kementerian teknis sebagai engine	Merangkap ke ranah moneter — berfungsi sebagai 'kasir', bukan arsitek
<b>Kemenperin</b>	Industrialisasi, hilirisasi, daya saing manufaktur, kebijakan investasi industri	Lemah, anggaran terbatas, tidak punya otoritas eksekusi riil di lapangan
<b>Kemendag</b>	Ekspor, akses pasar luar negeri, negosiasi FTA, perlindungan industri domestik	Silo, tidak terkoordinasi dengan Kemenperin, reaktif bukan proaktif
<b>Kementan</b>	Swasembada pangan, produktivitas agrikultur, teknologi pertanian, rantai pasok pangan	Anggaran tidak memadai, program tidak berbasis data produksi riil
<b>KKP</b>	Ekonomi biru, ekspor perikanan, pengelolaan ZEE, hilirisasi hasil laut bernilai tambah	Underutilized — potensi laut terbesar kedua dunia tidak tergarap optimal

### 3.2 Pelajaran dari Vietnam: MoIT sebagai Engine

Vietnam adalah bukti empiris paling relevan bahwa kementerian teknis yang kuat dan berfokus adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam — Ministry of Industry and Trade atau MoIT — adalah engine utama pertumbuhan ekspor Vietnam. Mereka tidak menunggu investor datang; mereka secara aktif mendatangi Samsung, Intel, LG, dan Foxconn untuk menawarkan paket insentif investasi yang terstruktur, lengkap dengan kepastian regulasi, ketersediaan kawasan industri, dan jaminan tenaga kerja terlatih.

Hasilnya berbicara sendiri. Ekspor Vietnam pada 2023 mencapai USD 355 miliar — melampaui Indonesia yang hanya USD 258 miliar, padahal populasi Vietnam hanya sepertiga Indonesia dan Vietnam tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang sebanding. Lebih dari 85% ekspor Vietnam adalah barang manufaktur bernilai tambah tinggi, sementara Indonesia masih didominasi komoditas mentah atau setengah jadi di kisaran 65% dari total ekspor. Perbedaan ini bukan soal sumber daya — ini soal kapasitas kementerian teknis untuk mengubah kebijakan menjadi pertumbuhan nyata.

Indikator	Indonesia	Vietnam	Keterangan
Populasi	277 Juta	98 Juta	Indonesia hampir 3x lebih besar
Ekspor 2023	USD 258 Miliar	USD 355 Miliar	Vietnam 37% lebih besar dari Indonesia
Jumlah Kementerian	48	18	Indonesia 2.7x lebih banyak kementerian
Pertumbuhan Ekspor (5 tahun)	~4-5% per tahun	~8-10% per tahun	Vietnam tumbuh hampir 2x lebih cepat
Ekspor Manufaktur (% total)	~35%	~85%	Vietnam jauh lebih terhilirisasi
Strategi Investasi	Reaktif, tunggu investor	Proaktif, jemput investor	Perbedaan pendekatan MoIT vs Kementerian



# 4

## SPEKTRUM PARTAI: MULTIPARTAI TANPA IDEOLOGI

Pada Pemilu 2024, terdapat 18 partai politik peserta pemilu legislatif. Hanya 8 yang berhasil melampaui ambang batas parlemen 4% dan mendapatkan kursi di DPR. Dari 8 partai yang lolos, hampir seluruhnya akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Artinya: Indonesia secara formal adalah negara multipartai, namun secara substantif beroperasi mendekati sistem tanpa oposisi yang genuine — sebuah kondisi yang dalam ilmu politik disebut sebagai *manufactured consensus* atau konsensus yang dipaksakan.

Fakta Pemilu 2024	Angka	Implikasi Struktural
Partai peserta pemilu legislatif	18	Terlalu terfragmentasi — tidak ada platform yang cukup kuat untuk dibedakan
Partai lolos parlemen ( $\geq 4\%$ )	8	10 partai gagal — suara puluhan juta pemilih tidak terrepresentasi sama sekali
Partai masuk koalisi pemerintah	7-8	Hampir tidak ada oposisi substantif di parlemen — check and balance melemah
Ambang batas parlemen	4%	Terlalu rendah untuk mendorong konsolidasi dan diferensiasi ideologis partai

### 4.1 Catch-All Party: Semua Mengatasnamakan Rakyat

Ilmuwan politik Otto Kirchheimer (1966) memperkenalkan konsep *catch-all party* untuk menggambarkan partai yang sengaja mengaburkan identitas ideologisnya guna meraup pemilih seluas mungkin. Partai-partai Indonesia adalah manifestasi ekstrem dari konsep ini: semua mengklaim pro-rakyat, pro-buruh, pro-petani, pro-nelayan, pro-UMKM — tanpa satu pun yang berani menyatakan secara jelas di mana mereka berdiri dalam spektrum kebijakan ekonomi yang konkret.

Konsekuensinya sangat destruktif bagi tata negara. Pertama, ketika semua partai mengklaim pro-rakyat, tidak ada yang bertanggung jawab ketika rakyat masih miskin — karena tidak ada platform yang spesifik dan terukur yang bisa dijadikan basis akuntabilitas. Kedua, tidak ada oposisi substantif yang menawarkan alternatif kebijakan yang terukur dan berbeda. Yang ada hanya oposisi gaya — kritik tanpa platform alternatif. Ketiga, ketika hampir semua partai masuk koalisi pemerintah, fungsi *check and balance* parlemen menjadi semu. DPR yang seharusnya mengawasi eksekutif justru menjadi perpanjangan tangan eksekutif.

Yang lebih berbahaya lagi: partai yang tidak memiliki ideologi ekonomi yang jelas tidak memiliki kader yang dilatih untuk kebijakan ekonomi spesifik. Kader partai dilatih untuk menang pemilu — untuk kampanye, untuk mobilisasi massa, untuk negosiasi koalisi. Bukan untuk menjalankan kementerian. Ketika kursi menteri diperoleh, mereka tidak tahu harus berbuat apa selain menjalankan kementerian dengan insting politik semata — yang pada akhirnya tidak berbeda dari menjalankan kementerian seperti mesin kampanye.

---

## 4.2 Mengapa Spektrum Kiri-Kanan Paling Relevan untuk Indonesia

Indonesia lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme — sebuah sistem eksploitasi ekonomi yang secara struktural menguntungkan pusat kekuasaan asing dengan mengorbankan rakyat dan sumber daya lokal. Dari pengalaman historis ini, seharusnya muncul dua respons ideologis yang organik, genuine, dan saling berlawanan — persis seperti yang terjadi di negara-negara pascakolonial lainnya yang kini memiliki sistem kepartaian yang lebih matang.

Dimensi pertama adalah spektrum ekonomi: antara kubu yang meyakini bahwa distribusi pendapatan dan perlindungan buruh harus menjadi prioritas (kiri), dan kubu yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis pasar bebas dan investasi adalah jalan utama kemakmuran (kanan). Dimensi kedua, yang khusus relevan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat heterogen, adalah spektrum tata kelola wilayah: antara kubu yang mendorong otonomi daerah yang kuat dan desentralisasi fiskal (federalis), dan kubu yang meyakini bahwa pemerintah pusat yang kuat adalah syarat kohesi nasional dan efisiensi pembangunan (sentralis).

Dimensi	Spektrum Kiri / Federalis	Spektrum Kanan / Sentralis
Ekonomi	Pro-buruh, redistribusi, negara sebagai pelaku utama, subsidi strategis	Pro-pasar, pertumbuhan dulu baru redistribusi, privatisasi strategis
Tata Kelola Wilayah	Otonomi daerah kuat, desentralisasi fiskal, daerah kelola SDA sendiri	Pemerintah pusat dominan, efisiensi nasional, kebijakan seragam dari Jakarta
Basis Pemilih Ideal	Wong cilik, buruh, petani, nelayan, masyarakat daerah terpinggirkan	Kelas menengah urban, investor, pelaku bisnis, profesional Jakarta-sentris
Referensi Global	Labour UK, SPD Jerman, Partai Buruh Australia, PSOE Spanyol	Konservatif UK, CDU Jerman, LDP Jepang, Partai Republik AS

## 4.3 Ruang Ideologis yang Kosong Sejak 1965

Dalam konteks Indonesia, ruang ideologis kiri yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan buruh, petani, dan nelayan praktis kosong sejak 1965. Setelah likuidasi PKI, tidak ada partai yang benar-benar mengisi ruang tersebut dengan platform ekonomi rakyat yang jelas, terukur, dan dapat ditagih. Akibatnya, banyak wong cilik tidak memiliki representasi politik yang nyata. Pilihan politik lebih sering didasarkan pada citra, kedekatan emosional, atau patronase, bukan program kebijakan yang konkret. Partai pun tidak merasa terikat untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil karena minimnya akuntabilitas berbasis platform.

Situasi ini menciptakan lingkaran setan: rakyat kecil tidak memiliki representasi kuat, kebijakan tetap didominasi kepentingan modal dan elite, ketimpangan bertahan, dan pola politik patronase terus berulang.

---

---

# 5

## PELAJARAN DARI PEMIMPIN VISIONER

**Dua pemimpin Asia yang paling berhasil mengeksekusi transformasi ekonomi dalam sejarah modern — Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di China** — memiliki pendekatan yang berbeda secara konteks namun berbagi satu prinsip mendasar yang sama: fokus sekuensial, bukan simultan. Keduanya tidak mencoba membangun semua sektor sekaligus. Keduanya memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Dan keduanya memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang tidak populer secara politik namun benar secara ekonomis.

### 5.1 Lee Kuan Yew: Concentrated Leadership Model

Singapura di era awal Lee Kuan Yew (LKY) bukanlah negara yang memiliki keunggulan apapun. Ia menghadapi tantangan yang dalam banyak hal jauh lebih berat dari Indonesia: tidak ada sumber daya alam sama sekali, wilayah hanya 700 kilometer persegi, penduduk heterogen yang baru saja mengalami trauma konflik rasial, dan baru saja dikeluarkan dari federasi Malaysia pada 1965. Kondisi awal Singapura jauh lebih buruk dari Indonesia pada periode yang sama.

Namun LKY membuat tiga keputusan fundamental yang mengubah segalanya dalam dua dekade. Pertama, ia memilih fokus sekuensial yang sangat disiplin: Singapura tidak mencoba membangun semua sektor sekaligus. Di era pertama, fokusnya adalah pelabuhan dan logistik, manufaktur ringan berbasis ekspor, dan penegakan ketertiban hukum. Hanya setelah fondasi ini kokoh, Singapura bergerak ke jasa keuangan, kemudian ke teknologi tinggi dan farmasi. Tidak pernah ada upaya untuk melakukan semua ini bersamaan.

Kedua, LKY membangun kabinet berbasis kompetensi yang mutlak. Ia tidak punya kemewahan untuk 'membayar' dukungan politik dengan kursi menteri — karena PAP memenangkan mayoritas absolut secara konsisten, ia tidak membutuhkan koalisi. Ini memberinya kebebasan untuk memilih menteri berdasarkan satu kriteria tunggal: kemampuan untuk mengeksekusi. Hasilnya adalah kabinet yang didominasi technocrat, akademisi, dan profesional berpengalaman — bukan politikus yang dibayar jasa kampanyenya.

Ketiga, ia membangun meritokrasi birokrasi yang sistemik. Rekrutmen dan promosi birokrat berdasarkan prestasi yang terukur dan terverifikasi, bukan koneksi atau afiliasi politik. Gaji birokrat senior dikompertisikan dengan sektor swasta untuk memastikan Indonesia menarik talenta terbaik ke dalam pelayanan publik. Dan korupsi ditindak secara konsisten tanpa pandang bulu — membangun reputasi yang pada akhirnya menjadi aset ekonomi itu sendiri.

---

---

**"If you have a sick economy, you need doctors, not politicians." — Lee Kuan Yew**

Kalimat ini bukan sekadar retorika. LKY membangun sistem di mana kalimat ini menjadi prinsip operasional yang diterapkan secara konsisten. Hasilnya: Singapura bertransformasi dari negara berkembang dengan PDB per kapita di bawah USD 500 pada 1965 menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia — di atas USD 88.000 pada 2023 — dalam kurang dari 40 tahun.

## 5.2 Deng Xiaoping: Pragmatic Gradualism

Deng Xiaoping menghadapi situasi yang secara struktural sangat berbeda dari LKY: sistem satu partai dengan birokrasi kolosal yang terfragmentasi dan trauma akibat Revolusi Kebudayaan, ideologi yang telah menghambat inisiatif ekonomi selama dua dekade, dan resistensi internal yang sangat kuat dari faksi konservatif Partai Komunis China. Dalam konteks ini, Deng mengembangkan pendekatan yang ia sendiri rangkum dalam satu kalimat yang menjadi salah satu kutipan ekonomi paling terkenal dalam sejarah:

**"不管黑猫白猫，能抓住老鼠就是好猫"**

*"Tidak peduli kucing hitam atau putih — yang penting bisa menangkap tikus."*

Pragmatisme radikal ini diterapkan secara konsisten dan bertahap. Alih-alih melakukan reformasi besar-besaran di seluruh China sekaligus — yang pasti akan mendapat resistensi masif dan berpotensi gagal secara kacau — Deng memilih pendekatan eksperimental yang terlokalisasi. Shenzhen, sebuah kota kecil di perbatasan Hong Kong, dipilih sebagai Special Economic Zone pertama. Bukan seluruh China. Satu titik percobaan.

Ketika Shenzhen berhasil — dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi — model tersebut direplikasi ke Guangzhou, Shanghai, kemudian ke seluruh pesisir timur China. Ini adalah sequential focus dalam skala nasional: buktikan konsep di satu titik terlebih dahulu, pelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak, lalu perluas secara sistematis.

Relevansinya untuk Indonesia sangat langsung: hilirisasi nikel yang dimulai oleh pemerintahan sebelumnya adalah 'Shenzhen-nya Indonesia' — satu titik yang sudah terbukti berhasil menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Pertanyaannya adalah: siapa yang bertugas merancang replikasi model ini ke sektor komoditas lainnya? Tembaga? Bauksit? Rumput laut? Lobster? Kepiting? Tanpa kementerian teknis yang kuat, terkoordinasi, dan dipimpin oleh orang yang kompeten, pertanyaan ini tidak akan pernah memiliki jawaban operasional.

---

---

### 5.3 Developmental State Theory

Chalmers Johnson (1982) mengembangkan Developmental State Theory dari studi kasus Jepang dan Korea Selatan pasca-Perang Dunia II. Premis intinya sederhana namun sangat kuat: untuk mencapai industrialisasi cepat dalam konteks negara berkembang, negara tidak bisa hanya berfungsi sebagai regulator pasif yang menetapkan aturan dan menunggu pasar bekerja. Negara harus menjadi aktor ekonomi aktif yang secara strategis memilih sektor prioritas (picking winners), melindungi industri muda dari kompetisi internasional yang prematur (infant industry protection), mendorong transfer teknologi dan inovasi, dan kemudian secara bertahap melepas proteksi ketika industri sudah cukup matang untuk bersaing sendiri.

Korea Selatan adalah contoh paling dramatis: dari negara yang lebih miskin dari Ghana pada 1960, menjadi negara industri maju dalam satu generasi — berkat kombinasi developmental state yang kuat, konglomerat yang dikelola ketat (chaebol), dan investasi masif dalam pendidikan teknik dan riset. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea (MITI-style ministry) adalah command center dari transformasi ini — bukan Kementerian Keuangannya.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi developmental state yang berhasil: sumber daya alam yang berlimpah untuk dijadikan modal awal, pasar domestik yang besar untuk menyerap produksi industri dalam negeri, dan posisi geopolitik yang strategis di persimpangan jalur perdagangan global. Yang kurang adalah kapasitas eksekusi di tingkat kementerian teknis — dan itu adalah masalah sumber daya manusia dan sistem insentif, bukan masalah visi atau sumber daya alam.





---

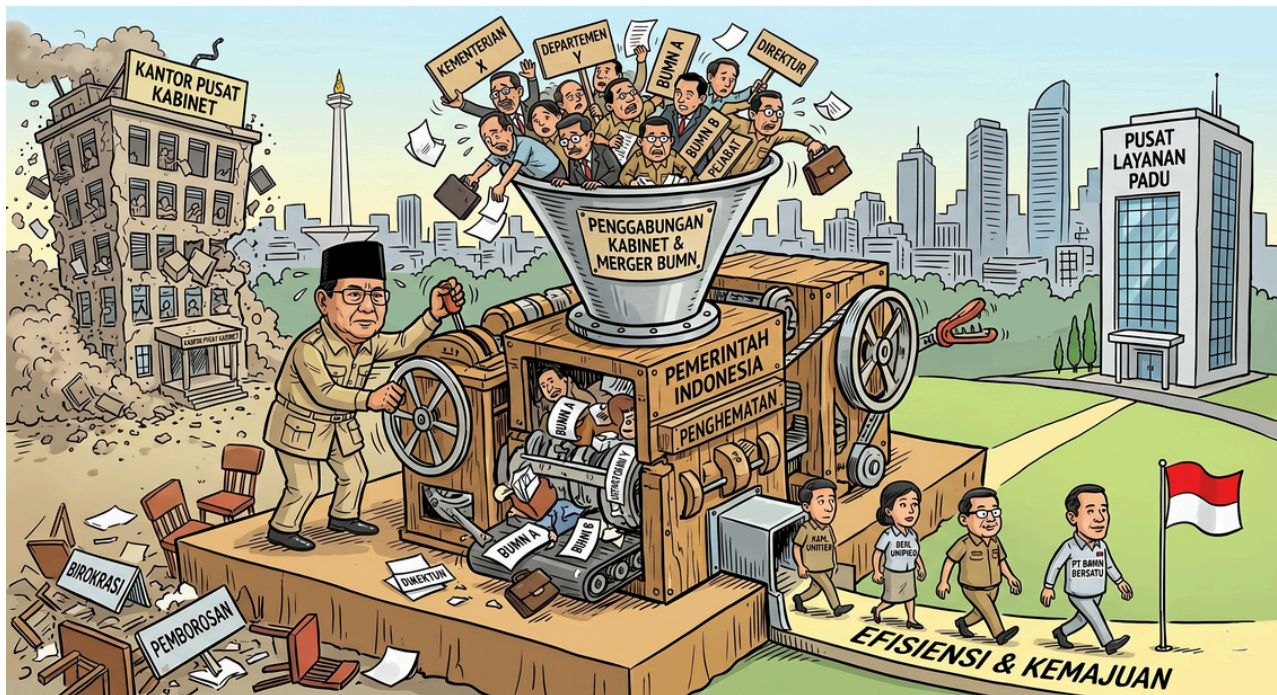
## 6.2 Jangka Menengah (18 Bulan–4 Tahun)

- Merger kementerian yang memiliki fungsi tumpang tindih: Kemenperin dan Kemendag disatukan menjadi Kementerian Ekonomi Produktif — mengikuti model Jerman (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) yang menempatkan perdagangan dan industri dalam satu komando dengan satu strategi yang koheren.
- Reformasi rekrutmen pejabat eselon I dan II: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di kementerian teknis strategis wajib berasal dari jalur karir birokrasi berbasis meritokrasi yang terverifikasi, atau akademisi ahli dengan rekam jejak yang relevan — bukan titipan politik dari partai koalisi.
- Penguatan anggaran kementerian teknis melalui realokasi dari pos operasional protokol dan staf seremonial ke program produktif berbasis outcome. Rasio anggaran program vs anggaran operasional di kementerian teknis harus dibalik: dari dominasi operasional saat ini, menuju dominasi program yang menghasilkan output terukur.
- Pengembangan sistem evaluasi kinerja kementerian yang independen dan publik — mengadaptasi model Singapore Public Service Division yang secara rutin mengevaluasi kinerja kementerian berdasarkan indikator yang ditetapkan di awal tahun anggaran dan dipublikasikan di akhir tahun.

## 6.3 Jangka Panjang: Reformasi Struktural

- Reformasi UU Kementerian Negara: tetapkan batas maksimal 28 kementerian dengan persyaratan kompetensi minimal yang terverifikasi untuk menteri di kementerian teknis strategis. Jumlah 28 dipilih sebagai angka yang cukup untuk mencakup semua fungsi pemerintahan esensial tanpa menciptakan coordination overhead yang berlebihan.
  - Reformasi sistem kepartaian: naikkan electoral threshold secara bertahap — dari 4% saat ini menuju 7–8% dalam dua siklus pemilu — untuk mendorong konsolidasi partai menuju 4–5 partai dengan platform kebijakan yang terdiferensiasi secara substantif dan dapat diaudit publik.
  - Buka ruang bagi partai berbasis ideologi yang genuine dan legitimate: partai buruh dengan platform perlindungan tenaga kerja yang konkret, partai otonomi daerah dengan platform desentralisasi fiskal yang terukur, partai lingkungan dengan platform ekonomi hijau yang berbasis sains — sehingga wong cilik memiliki pilihan representasi yang substantif.
  - Reformasi sistem pendanaan kampanye: transparansi penuh atas sumber dana kampanye untuk memutus ketergantungan partai pada donor besar yang pada akhirnya mendistorsi kebijakan pasca-pemilu. Partai yang tidak tergantung pada konglomerat memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengeksekusi platform yang pro-rakyat.
-

Rekomendasi	Cakrawala	Aktor Utama	Hambatan Utama
Moratorium Wamen + KPI Publik	0-18 Bulan	Presiden / Setneg	Resistensi koalisi partai yang kehilangan posisi
Inter-Ministerial Task Force	0-18 Bulan	Menko Ekonomi	Ego sektoral dan resistensi birokrasi kementerian
Klarifikasi Domain Kemenkeu-BI	0-18 Bulan	Presiden + Kemenkeu + BI	Resistensi internal Kemenkeu terhadap reduksi otoritas
Merger Kemenperin + Kemendag	18-48 Bulan	Presiden + DPR	Keentingan birokrasi dan partai yang kehilangan jatah
Reformasi Rekrutmen Eselon I-II	18-48 Bulan	KemenPANRB + BKN	Tekanan politik dari partai koalisi yang kehilangan patronase
Reformasi UU Kementerian Negara	4+ Tahun	DPR + Pemerintah	Konsensus politik lintas partai yang sangat sulit dicapai
Reformasi Sistem Kepartaian	4+ Tahun	KPU + DPR + Parpol	Resistensi langsung dari partai existing yang diuntungkan status quo



## PENUTUP

Masalah ekonomi Indonesia bukan masalah visi. Visi presiden — hilirisasi, swasembada pangan, ekonomi biru, industrialisasi berbasis domestik — secara substansial sudah benar dan sudah seharusnya menjadi arah kebijakan bangsa. Masalahnya adalah translasi. Translasi visi menjadi regulasi. Regulasi menjadi program. Program menjadi target. Target menjadi eksekusi. Dan rantai translasi itu terputus — bukan karena Indonesia tidak mampu, tetapi karena sistem yang ada tidak dirancang untuk mentranslasi visi secara efektif.

Tiga akar masalahnya sudah diidentifikasi dalam whitepaper ini. Pertama, kabinet yang dibangun atas dasar utang politik menghasilkan menteri tanpa kompetensi teknis di bidang yang dipimpinnya — menciptakan kegagalan translasi di titik paling kritis dari rantai kebijakan. Kedua, struktur kementerian yang terlalu gemuk menciptakan coordination overhead yang mengalahkan manfaat spesialisasi — 48 kementerian dengan belasan wakil menteri menghasilkan lebih banyak rapat koordinasi daripada kebijakan yang berdampak. Ketiga, sistem kepartaian tanpa ideologi yang jelas menghasilkan koalisi tanpa visi ekonomi yang koheren — memperparah masalah pertama karena tidak ada tekanan dari bawah (partai oposisi yang kuat) maupun dari atas (platform kebijakan partai yang spesifik dan bisa ditagih) untuk memaksa kementerian bekerja secara efektif.

Ketiga masalah ini tidak berdiri sendiri — mereka saling memperkuat dalam sebuah sistem yang secara keseluruhan tidak dirancang untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Sistem koalisi yang mahal melahirkan kabinet patronase. Kabinet patronase menghasilkan kementerian yang lemah. Kementerian yang lemah tidak bisa mengeksekusi visi presiden. Dan tidak adanya oposisi ideologis yang kuat berarti tidak ada tekanan sistemik untuk mengubah status quo ini.

**Lee Kuan Yew pernah berkata bahwa** Singapura tidak memiliki hak untuk membuat kesalahan karena ia terlalu kecil. Indonesia memiliki kemewahan yang berbeda: cukup besar untuk bertahan dari kesalahan — dan justru itulah yang membuatnya lambat berubah. Setiap kegagalan kebijakan diserap oleh besarnya ekonomi, diredam oleh kekayaan sumber daya alam, dan dilupakan dalam siklus pemilu berikutnya. Tapi kemewahan itu ada batasnya. Vietnam tidak menunggu. India tidak menunggu. Bangladesh telah melampaui Pakistan dalam PDB per kapita. Dan dunia tidak akan menunggu Indonesia untuk akhirnya membangun mesin eksekusi yang sepadan dengan ambisi visinya. Sumber daya ada. Visi ada. Pasar ada. Yang tersisa hanyalah keberanian politik untuk melakukan apa yang sudah jelas perlu dilakukan: menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, memangkas struktur yang tidak berfungsi, dan membangun sistem yang memberikan insentif yang benar kepada semua aktor — dari menteri hingga partai politik hingga birokrat di lapangan.

---

## DAFTAR REFERENSI

*(Disusun untuk mendukung analisis makroekonomi, kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan perbandingan kebijakan publik dalam whitepaper: Disonansi Kebijakan dan Kegagalan Translasi Visi)*

### **Sumber Data Nasional**

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Indonesia; Laporan Pertumbuhan Ekonomi; Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)* (berbagai edisi). Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Ekspor Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan APBN; Nota Keuangan dan Rancangan APBN* (berbagai tahun). Jakarta: Kemenkeu.

Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia; Statistik Neraca Pembayaran; Laporan Kebijakan Moneter* (berbagai edisi). Jakarta: BI.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Laporan Realisasi Investasi; Statistik FDI Indonesia* (berbagai tahun). Jakarta: BKPM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Harga Bahan Bakar Minyak; Kebijakan Subsidi Energi* (berbagai tahun). Jakarta: KESDM.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Laporan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT); Statistik Ketenagakerjaan* (berbagai edisi). Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Data Pemutusan Hubungan Kerja; Laporan Pasar Kerja Nasional* (berbagai tahun). Jakarta: Kemenaker.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu Legislatif 2024*. Jakarta: KPU.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Laporan Kinerja 2023*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.

---

---

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara Kabinet Merah Putih.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **Sumber Data & Lembaga Internasional**

World Bank. *World Development Indicators; Ease of Doing Business Index; Indonesia Economic Prospects* (berbagai edisi). Washington D.C.: World Bank.

International Monetary Fund. *Article IV Consultation — Indonesia; World Economic Outlook* (berbagai edisi). Washington D.C.: IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Government at a Glance 2023*. Paris: OECD Publishing.

ASEAN Secretariat. *ASEAN Statistical Yearbook 2023*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

General Statistics Office of Vietnam (GSO). *Statistical Yearbook of Vietnam 2023*. Hanoi: Statistical Publishing House.

Ministry of Industry and Trade of Vietnam (MoIT). *Annual Report on Industrial and Trade Activities 2023*. Hanoi: MoIT.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *World Investment Report* (berbagai edisi). Geneva: UNCTAD.

World Justice Project. *Rule of Law Index* (berbagai edisi). Washington D.C.: WJP.

Asian Development Bank. *Asian Development Outlook; Key Indicators for Asia and the Pacific* (berbagai edisi). Manila: ADB.

Japan External Trade Organization (JETRO). *Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and Oceania* (berbagai tahun). Tokyo: JETRO.

---



---

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

UN Comtrade Database. Export Data by Country and Commodity 2019–2023. [<https://comtrade.un.org>]

### **Referensi Akademis & Teoritis**

Acemoglu, Daron & Robinson, James A. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers, 2012.

North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–360, 1976.

Johnson, Chalmers. *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford: Stanford University Press, 1982.

Kirchheimer, Otto. "The Transformation of the Western European Party Systems." Dalam *Political Parties and Political Development*. Princeton: Princeton University Press, 1966.

Hayek, Friedrich A. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review*, Vol. 35, No. 4, 1945.

Hayek, Friedrich A. *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press, 1944.

Higgs, Robert. "Regime Uncertainty: Why the Great Depression Lasted So Long and Why Prosperity Resumed after the War." *The Independent Review*, Vol. 1, No. 4, 1997.

Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Rodrik, Dani. *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton & Company, 2011.

---

---

Fukuyama, Francis. "What Is Governance?" *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* 26 (3): 347–368, 2013.

Evans, Peter B. *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Lee, Kuan Yew. *From Third World to First: The Singapore Story 1965–2000*. New York: HarperCollins, 2000.

Vogel, Ezra F. *Deng Xiaoping and the Transformation of China*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Ang, Yuen Yuen. *How China Escaped the Poverty Trap*. Ithaca: Cornell University Press, 2016.

Woo-Cumings, Meredith, ed. *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.

Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon, 2004.

Winters, Jeffrey A. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." *Indonesia*, No. 96: 11–33. Cornell Southeast Asia Program Publications, 2013.

Warr, Peter, dan Arief Anshory Yusuf. "Indonesia's Economic Transformation: Progress and Remaining Challenges." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58 (1): 1–28, 2022.

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

## GLOSSARY

- **ABS (Asal Bapak Senang):** Kultur birokrasi di mana laporan yang naik ke atas sudah disaring dan diperindah — memutus realita lapangan dari pengambilan keputusan.
- **Agent:** Pihak yang menerima delegasi otoritas dari principal untuk menjalankan kebijakan. Dalam whitepaper ini, menteri adalah agent yang menerima mandat dari presiden. Masalah utamanya: agent tidak selalu menjalankan kehendak principal karena perbedaan informasi, insentif, atau kapasitas.
- **Chilling Effect:** Efek penghambatan investasi yang timbul dari ketidakpastian kebijakan, bukan larangan langsung.

- 
- **Capital Flight:** Perpindahan modal keluar dari suatu negara akibat erosi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi atau kepastian kebijakan.
  - **Catch-All Party:** Konsep Kirchheimer (1966) — partai politik yang sengaja mengaburkan identitas ideologisnya guna meraup pemilih seluas mungkin, mengorbankan kejelasan platform demi jangkauan elektoral.
  - **Chilling Effect:** Efek penghambatan investasi yang timbul dari ketidakpastian kebijakan, bukan larangan langsung.
  - **Coordination Overhead:** Biaya waktu, energi, dan sumber daya yang terserap untuk koordinasi internal antarlembaga yang tidak secara langsung menghasilkan kebijakan atau output yang bermanfaat. Semakin banyak kementerian, semakin besar overhead ini.
  - **Cost-Push Inflation:** Inflasi akibat kenaikan biaya produksi — bukan peningkatan permintaan.
  - **Current Account Deficit:** Nilai impor melebihi ekspor secara persisten — menekan nilai tukar secara struktural.
  - **Developmental State:** Konsep Johnson (1982) — negara yang berfungsi sebagai aktor ekonomi aktif, bukan sekadar regulator pasif. Negara secara strategis memilih sektor prioritas dan mendorong industrialisasi cepat.
  - **Domain Knowledge:** Pengetahuan mendalam dan spesifik tentang suatu bidang yang diperoleh melalui pengalaman dan studi yang panjang. Menteri tanpa domain knowledge adalah akar dari kegagalan translasi kebijakan.
  - **Electoral Threshold:** Ambang batas persentase suara minimum yang harus diperoleh suatu partai agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Indonesia menerapkan 4% — dinilai terlalu rendah untuk mendorong konsolidasi ideologis.
  - **Enclave Investment:** Investasi asing yang tidak mentransfer teknologi dan tidak menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
  - **Fiscal Multiplier:** Seberapa besar aktivitas ekonomi yang dihasilkan per unit belanja pemerintah.
  - **Hilirisasi:** Proses pengolahan bahan baku atau komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi sebelum diekspor. Contoh: nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik, bukan diekspor sebagai bijih mentah.
  - **Hot Money:** Investasi portofolio jangka pendek yang masuk dan keluar mengikuti sentimen global.
  - **ICOR (Incremental Capital-Output Ratio):** Berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output — semakin tinggi ICOR, semakin inefisien.
  - **Incompetence:** Ketidakmampuan teknis atau manajerial untuk menjalankan tugas secara efektif. Salah satu dari tiga penyebab utama kegagalan agent, di samping information asymmetry dan perbedaan insentif.
  - **Information Asymmetry:** Kondisi di mana dua pihak memiliki akses informasi yang tidak setara. Menteri yang diangkat berdasarkan loyalitas politik cenderung memiliki information asymmetry yang besar terhadap bidang yang dipimpinnya.
-

- 
- **KPI (Key Performance Indicator):** Indikator kinerja utama — ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. KPI yang baik berbasis outcome, bukan output proses.
  - **Knowledge Problem:** Konsep Hayek — informasi ekonomi bersifat lokal dan tersebar, tidak bisa dikuasai pemerintah sepenuhnya.
  - **Meritokrasi:** Sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang terukur — bukan koneksi atau afiliasi politik.
  - **Middle Income Trap:** Negara terjebak pada pendapatan menengah dan gagal bertransisi menjadi negara maju.
  - **Patronage Cabinet:** Kabinet yang dibentuk berdasarkan balas jasa politik kepada pendukung koalisi, bukan berdasarkan kompetensi.
  - **Patrimonial Bureaucracy:** Posisi birokrasi diisi berdasarkan loyalitas personal kepada patron politik, bukan kompetensi.
  - **Presidential Threshold:** Ambang batas persentase kursi atau suara yang harus dimiliki koalisi untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden — mendorong koalisi besar dan kewajiban bagi-bagi kursi kabinet.
  - **Principal-Agent Theory:** Kerangka teoritis yang menganalisis hubungan antara pihak yang mendelegasikan otoritas (principal) dan pihak yang menerima delegasi (agent). Tiga masalah utama: information asymmetry, perbedaan insentif, dan incompetence.
  - **Regime Uncertainty:** Konsep Higgs — ketidakpastian arah kebijakan lebih merusak investasi dari pajak tinggi sekalipun.
  - **Rent-Seeking:** Mencari keuntungan lewat manipulasi regulasi, lobi politik, atau akses istimewa — bukan penciptaan nilai produktif.
  - **Sequential Focus:** Pendekatan pembangunan yang memprioritaskan pengerjaan satu atau beberapa sektor secara mendalam sebelum memperluas ke sektor lain. Diterapkan oleh LKY di Singapura dan Deng Xiaoping di China.
  - **Silent Recession:** Kontraksi ekonomi sektoral yang tidak tertangkap angka PDB nasional.
  - **Spoils System:** Sistem di mana jabatan pemerintah didistribusikan kepada pendukung politik pemenang pemilu sebagai imbalan — bukan berdasarkan kualifikasi.
  - **Spontaneous Order:** Konsep Hayek — tatanan ekonomi organik yang tumbuh dari interaksi individu, bukan perencanaan pusat.
  - **Supply Chain:** Rantai pasok — keseluruhan jaringan proses dan sumber daya dari bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir.
  - **Transaction Costs:** Biaya ketidakpastian dalam transaksi ekonomi — indikator kualitas institusi suatu negara. Semakin tinggi transaction costs, semakin buruk lingkungan bisnisnya.
  - **ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif):** Wilayah perairan hingga 200 mil laut dari garis pantai di mana suatu negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam. Indonesia memiliki ZEE terbesar kedua di dunia, namun potensinya belum dimanfaatkan optimal.



---

# THE FINAL VISION

## “Fondasi Sebelum Ambisi — Data Sebelum Narasi”

Whitepaper ini bukan sekadar kritik terhadap kebijakan yang gagal atau angka yang tidak jujur. Ini adalah seruan untuk membangun standar yang lebih tinggi — bagi pembuat kebijakan yang memegang kepercayaan publik, bagi birokrat yang menyampaikan laporan ke atas, bagi investor yang masih percaya pada potensi Indonesia, dan bagi setiap pelaku usaha yang setiap harinya berjuang membangun sesuatu yang nyata di tengah ekosistem yang tidak selalu berpihak.

Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya: pasar domestik terbesar keempat di dunia, sumber daya alam yang belum sepenuhnya diolah dengan cerdas, dan populasi muda yang produktif. Yang kurang bukan potensinya. Yang kurang adalah kejujuran institusional — kemampuan sebuah sistem untuk melihat dirinya sendiri apa adanya, mengakui kegagalannya, dan mengkoreksi arahnya sebelum kerusakan menjadi terlalu dalam untuk diperbaiki.

Selama laporan yang naik ke puncak adalah laporan yang menyenangkan, selama posisi kunci diisi bukan berdasarkan kompetensi domain, dan selama ketidakpastian kebijakan dibiarkan menjadi norma — potensi itu akan terus terkubur di bawah ambisi yang lebih besar dari kapasitas eksekusinya.

“

*Negara yang tidak mau jujur kepada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa jujur kepada rakyatnya. Dan negara yang tidak jujur kepada rakyatnya tidak layak mendapat kepercayaan investornya. Indonesia punya waktu — tapi jendela itu tidak terbuka selamanya. Bangun fondasinya dulu. Baru bangun gedungnya.*

— **Eisenhower Rockefeller**





**EISEN**  
GROUP

[WWW.EISENHOLDING.COM](http://WWW.EISENHOLDING.COM)

